

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Anisa Andriyani

E-mail: anisa.andriyani@yahoo.com

Baldric Siregar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Jalan Seturan Yogyakarta 55281

Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155

E-mail: siregar@accountant.com

ABSTRACT

The implementation of the regional autonomy that began at 2001 is expected can realize regional governments capable and accelerate the realization of public welfare through the empowerment and participation of local communities. As an implication, the role of local government in public service delivery and achievement of national development goals becomes greater. Therefore, performance measurement is needed to measure the progress that has been achieved by the local government. But on the implementation, the dependence of the regional government towards the central government is still high. This study aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product towards Local Own Revenue, the influence of Local Own Revenue towards Financial Performance, the influence of Gross Regional Domestic Product towards Financial Performance through Local Own Revenue as intervening variable. The sample that used in this study is entire regency/city in Jawa Tengah and DIY. Data that used are data of GRDP and the realization of the budget report from 2007-2011. Data were analyzed by Partial Least Square to examine the direct effect. And Sobel Test was used to examine the indirect effect. The re-

sults of this study showed that Gross Regional Domestic Product has positive and significant effect on Local Own Revenue, Local Own Revenue has positive and significant effect on Financial Performance, and Gross Regional Domestic Product has positive and significant effect on Financial Performance through Local Own Revenue as intervening variable.

Keywords: GRDP, financial performance, local own revenue

JEL classification: H72, H76

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 melahirkan perubahan yang mendasar mengenai hubungan antara pemerintah pusat

dan daerah. Undang-Undang tersebut merupakan respon atas keinginan daerah di Indonesia untuk membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat setempat. Melalui otonomi, suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi daerah. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan suatu alat untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan dan strategi organisasi sehingga dapat diketahui kinerja yang berhasil dicapai. Hasil pengukuran kinerja akan menginformasikan tentang apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal tersebut terjadi, atau apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya (Mahsun, 2012). Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi strategi dan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja.

Variabel keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi determinasi terhadap berhasil tidaknya implementasi otonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kinerja keuangan daerah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi dimulai tahun 2001. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja menggunakan indikator keuangan. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan dengan mengukur jumlah laba yang diperoleh karena pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga, perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

agar diperoleh gambaran tentang kecenderungan yang terjadi. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili entitas. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana pengaruh PDRB terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan PAD sebagai variabel intervensi.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan Otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan/bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik tersebut sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 1 menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Secara umum kinerja adalah prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006). Menurut Mahsun (2012) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja menggunakan indikator keuangan.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2012). Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan

untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006). Menurut Mahsun (2012) manfaat pengukuran kinerja sektor publik adalah 1) memperbaiki kinerja pemerintah, 2) dasar pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, 3) mewujudkan pertanggungjawaban publik, dan 4) memperbaiki komunikasi kelembagaan

Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio keuangan sebagai perbandingan dari unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim, 2007). Menurut Mahmudi (2010) rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja. Menurut Mahsun (2012) untuk pengukuran kinerja berbasis anggaran dapat digunakan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.

Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD dengan pendapatan transfer dan pinjaman. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran PAD. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal

dengan total belanja daerah. Dengan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat rutin dan memberikan manfaat jangka pendek. Belanja modal tidak bersifat rutin dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, belanja modal juga akan menambah aset daerah. Rasio pajak daerah terhadap PAD merupakan perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi total pendapatan asli daerah. Rasio pajak daerah terhadap PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007) PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam pelaksanaan otonomi sumber, pendapatan daerah diharapkan didominasi oleh PAD. Karena, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kemandirian daerah. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan rumah tangganya. Oleh karena itu, PAD dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi secara nyata.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah (BPS, 2012). PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan asal faktor produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Manfaat PDRB antara lain digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, dan sebagai proksi pendapatan per kapita. Menurut BPS (2012), nilai PDRB masing-masing daerah sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan faktor produksi di

suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Mewujudkan kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemampuan daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah adalah kinerja keuangan daerah yang sangat dituntut dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan cermin pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Sugianto, 2007). Besaran pajak dalam PAD menggambarkan volume aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai cermin meningkatnya PDRB menggambarkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya bertambah. Pajak dan pungutan lainnya merupakan sumber dari PAD. Hal tersebut didukung dengan penelitian Adi (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PAD. Dalam penelitian pada kota Makassar yang dilakukan Datu (2012) juga menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Kualitas kinerja lembaga dalam pemerintahan berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada (Chalid, 2005). Dukungan sumber daya keuangan yang memadai mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat. Peningkatan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga pemerintah. Dengan demikian, meningkatnya PDRB yang akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD, pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja daerah otonom. Dengan kata lain, peningkatan PDRB berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah secara tidak langsung melalui PAD. Meningkatnya PDRB mencerminkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya yang merupakan sumber PAD meningkat. Peningkatan PAD merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Sementara, pertumbuhan ekonomi merupakan cermin dari meningkatnya PDRB. Hipotesis yang dapat

dikembangkan dari pemaparan ini adalah:

H1: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

Dukungan sumber daya keuangan yang memadai mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan. PAD merupakan salah satu sumber daya keuangan yang dimiliki daerah selain dari pendapatan transfer. Semakin besar PAD akan meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri belanja daerahnya. Hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah:

H2: Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Meningkatnya PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Meningkatnya PDRB menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya sebagai sumber PAD meningkat. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan daerah, dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai belanjanya. Dengan kata lain, peningkatan PDRB akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah:

H3: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se-DIY dan Jawa Tengah. Peneliti menggunakan metode sensus dengan meneliti seluruh elemen dari populasi. Sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah, yaitu 4 kabupaten dan 1 kota di DIY serta 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2011 yang bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 2) data Produk Domestik

Tabel 1
Variabel Penelitian

No	Jenis	Variabel Penelitian	Indikator	Pengukuran
1	Exogenous	Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto	Ln. (PDRB)
2	Endogenous Intervening	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Ln. (PAD)
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKK)	PAD PT + PIN
			Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKD)	PT TP
3	Endogenous Dependen	Kinerja Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas PAD (REP)	PAD APAD
			Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (RBM)	BM TB
			Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (RPD)	PD PAD

Keterangan:

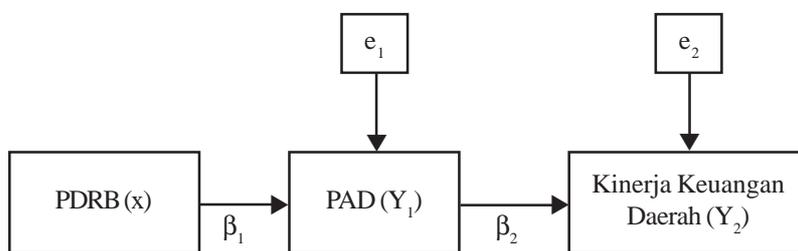
Ln	=	Logaritma Natural	PIN	=	Pinjaman
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto	APAD	=	Anggaran PAD
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah	BM	=	Belanja Modal
TP	=	Total Pendapatan	TB	=	Total Belanja
PT	=	Pendapatan Transfer	PD	=	Pajak Daerah

Regional Bruto (PDRB) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2011 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan DIY.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) variabel *exogenous* dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan asal faktor produksinya, 2) variabel *endogenous* intervening dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, 3) variabel *endogenous* dependen dalam

penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah, yaitu suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja Keuangan Daerah (KKD) dalam penelitian ini diukur dengan indikator rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio pajak daerah terhadap PAD.

Model penelitian yang digunakan adalah model analisis jalur. Model analisis jalur secara matematis merupakan model regresi *standardized* atau tanpa konstanta (Ghozali, 2011). Model analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kinerja keuangan daerah melalui PAD.



Gambar 1
Model Penelitian

Model dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural yaitu sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1 X + e_1 \quad 1$$

Persamaan Struktural 1 untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD.

$$Y_2 = b_2 Y_1 + e_2 \quad 2$$

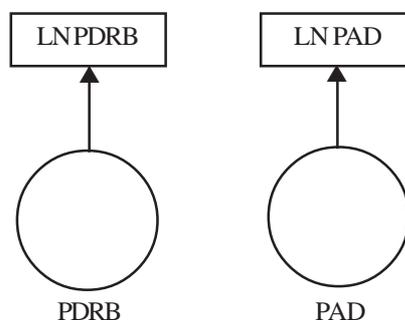
Persamaan Struktural 2 untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap KKD.

Keterangan :

b_1, b_2 = Koefisien Jalur

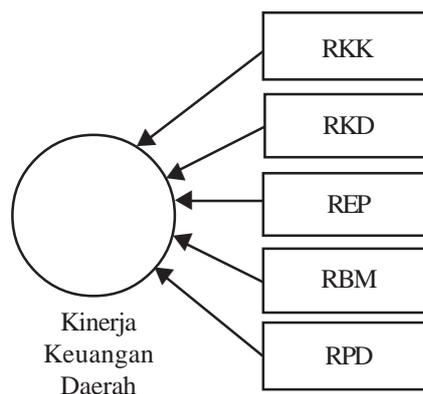
e_1, e_2 = Variabel Residu

Untuk menguji hipotesis digunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah salah satu teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung (Wiyono, 2011). PLS dikembangkan sebagai alternatif apabila dasar teori yang digunakan lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran reflektif. Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data dengan menggunakan software *smartPLS versi 2.0 M3*. *Inner model* adalah model yang menggambarkan hubungan antarvariabel laten berdasarkan *substantive theory* (Ghozali, 2011). *Outer Model* adalah spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya (Wiyono, 2011). Terdapat dua macam model indikator yaitu: model indikator reflektif dan model indikator formatif. Menurut Wiyono (2011), model reflektif mengasumsikan semua indikator seolah-olah dipengaruhi oleh variabel laten (konstruk). Dalam penelitian ini, ada dua *outer model* dengan indikator reflektif yaitu sebagai berikut:



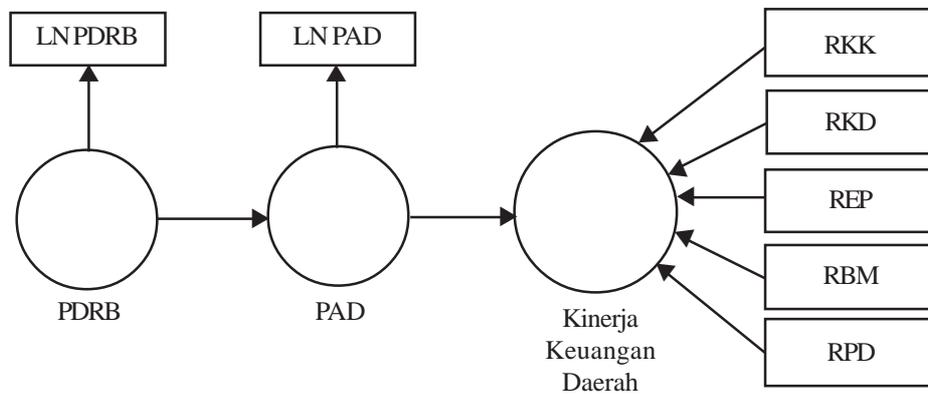
Gambar 2
Outer Model dengan Indikator Reflektif

Pada model formatif, arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten (Wiyono, 2011). Dalam penelitian ini, *outer model* dengan indikator formatif adalah:



Gambar 3
Outer Model dengan Indikator Formatif

Ilustrasi model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4
Ilustrasi Model

Pengujian mencakup pengujian terhadap *outer* model dan *inner* model. Pengujian *outer* model dengan indikator reflektif dilakukan dengan dua uji, yaitu uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji Validitas meliputi 1) uji Validitas yang meliputi pengujian i) *Convergent Validity*, dilakukan dengan melihat nilai *outer loading*. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $>0,7$ dari variabel laten yang ingin dukur (Ghozali, 2011), ii) *Discriminant Validity*, dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan variabel laten. Nilai korelasi *cross loading* dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain (Wiyono, 2011), iii) *Average Variance Extrated (AVE)*. Menurut Wiyono (2011), indikator dinyatakan valid jika nilai *average variance extrated (AVE)* $> 0,5$.

Uji Reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Menurut Ghozali (2011), indikator dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* $> 0,7$. Ghozali (2011:74) menyatakan bahwa indikator formatif tidak dapat dianalisis dengan melihat *convergent validity* dan *composite reliability*. Karena, pada dasarnya konstruk formatif merupakan hubungan regresi dari indikator ke variabel laten. Oleh karena itu, cara menilainya dengan melihat koefisien regresi dan

signifikansi dari koefisien regresi pada *outer weight* dengan perhitungan *bootstraping*. Signifikansi ($\hat{\alpha}$) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%.

Pengujian *inner* model terkait dengan pengujian hipotesis. Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam penelitian ini dilakukan prosedur *bootstraping* dengan menggunakan *software SmartPLS* terhadap sampel. Pengujian *bootstraping* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan. Hipotesis penelitian untuk pengaruh langsung diterima apabila *path coefficient* (koefisien parameter jalur) yang menunjukkan hubungan antarvariabel laten bernilai positif dan t statistik $> t$ tabel (Ghozali, 2011).

Sementara pengujian hipotesis untuk pengaruh tidak langsung dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel. Prosedur tersebut dikenal dengan uji Sobel atau *Sobel test*. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur $X \rightarrow M$ (a) dengan jalur $M \rightarrow Y$ (b) atau ab . Dalam penelitian ini koefisien a merupakan pengaruh PDRB terhadap PAD. Sementara koefisien b merupakan pengaruh PAD terhadap KKD. Besarnya *standar error* pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

Di mana Sa^2 dan Sb^2 merupakan *standar error* koefisien a dan b. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu dihitung nilai t dari koefisien ab. Nilai t koefisien ab dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T = ab/Sab$$

Apabila nilai t hitung tersebut > t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh tidak langsung. Signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Nilai *R-Square* menunjukkan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi menggambarkan persentase variasi dalam variabel *endogenous* yang dapat dijelaskan oleh variabel *exogenous*. Semakin besar nilainya (mendekati 100%) menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara variabel *exogenous* dengan variabel *endogenous*.

HASIL PENELITIAN

Analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan daerah yang telah

dicapai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2007-2011 diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio pajak daerah terhadap PAD.

Gambaran umum mengenai nilai rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY dapat dilihat pada Tabel 2.

Nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2007-2011 berkisar antara 10,31%-11,74%. Nilai rata-rata terendahnya yaitu 10,31% terjadi pada tahun 2007 dan nilai rata-rata tertingginya yaitu 11,74% terjadi tahun 2011. Sementara untuk nilai rata-rata kabupaten/kota di DIY berkisar antara 12,63%-17,12%. Nilai tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata terendahnya yaitu 12,63% terjadi tahun 2007 dan rata-rata tertingginya yaitu 17,12% terjadi tahun 2011. Kota Semarang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi di Jawa Tengah tahun 2007-2008 dan 2011. Sementara tahun 2009-2010 ditempati Kota Tegal. Untuk DIY, pada tahun 2007-2011 nilai tertinggi rasio kemandirian keuangan daerah ditempati

Tabel 2
Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Tahun 2007-2011 (dalam %)

		Jawa Tengah			
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	35	5,16	26,45	10,31	4,36
2008	35	5,44	29,19	10,40	4,61
2009	35	5,68	27,94	11,09	4,62
2010	35	5,65	29,30	11,57	5,28
2011	35	6,25	36,12	11,74	6,16
		DIY			
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	5	5,16	23,82	12,63	7,77
2008	5	5,31	23,94	13,30	7,97
2009	5	5,87	28,12	14,45	9,21
2010	5	5,88	29,18	14,48	9,36
2011	5	6,90	33,35	17,12	11,66

Sumber: Hasil penelitian, data diolah.

Kota Yogyakarta. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan daerah terendah di Jawa Tengah dan di DIY.

Tabel 3 menyajikan gambaran umum mengenai nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY masing-masing berkisar antara 85,95%-88,95% dan 79,81%-87,47%. Di Jawa Tengah, daerah yang memiliki nilai rasio ketergantungan keuangan paling rendah adalah Kota Semarang tahun 2007-2008 dan 2010-2011, serta Kota Tegal tahun 2009. Sementara daerah yang ketergantungan terhadap pemerintah pusat tertinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Klaten tahun 2007-2008, Kabupaten Sukoharjo tahun 2009, Kabupaten Batang tahun 2010, dan Kabupaten Demak tahun 2011. Di DIY, Kota Yogyakarta, tahun 2007 dan 2009-2010, Kabupaten Bantul tahun 2008, dan Kabupaten Sleman tahun 2011 merupakan daerah yang ketergantungan terhadap pemerintah pusat paling rendah. Untuk daerah yang ketergantungan terhadap pemerintah pusat paling tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo tahun 2007, 2011, dan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2008-2010.

Gambaran umum mengenai nilai rasio efektivitas PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY dapat dilihat pada Tabel 4. Nilai rata-rata rasio efektivitas PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY tahun 2007-2011 berada pada kriteria sangat efektif. Nilai rata-rata rasio efektivitas PAD pada kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut >100% yaitu berkisar 110,95%-121,74% untuk rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah dan 103,48%-131,70% untuk rata-rata kabupaten/kota di DIY. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang paling efektif dalam mengumpulkan PAD adalah Kabupaten Brebes tahun 2007-2008, Kabupaten Grobogan tahun 2009, Kabupaten Banyumas tahun 2010, dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2011. Sedangkan kabupaten Rembang tahun 2007, Kabupaten Klaten tahun 2008-2010, dan Kabupaten Brebes tahun 2011 merupakan daerah yang nilai rasio efektivitas PADnya paling rendah. Di Provinsi DIY daerah yang paling efektif dalam mengumpulkan PAD adalah Kabupaten Bantul tahun 2007, Kabupaten Sleman tahun 2008-2010 dan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2011. Sementara daerah yang nilai rasio efektivitas PADnya paling rendah adalah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2007, Kota Yogyakarta tahun 2008, Kabupaten Kulon Progo tahun 2009, 2011, dan Kabupaten Bantul pada tahun 2010.

Tabel 3
Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Tahun 2007-2011 (dalam %)

Tahun	N	Jawa Tengah			
		Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	35	77,32	94,44	88,95	3,56
2008	35	68,62	93,16	87,71	4,55
2009	35	76,50	93,34	88,04	3,58
2010	35	68,96	92,89	86,86	4,91
2011	35	70,31	93,35	85,54	5,35
DIY					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	5	77,91	92,83	87,47	6,42
2008	5	71,79	90,10	81,65	7,54
2009	5	76,57	92,03	85,19	5,99
2010	5	75,41	90,61	82,90	7,19
2011	5	68,83	90,47	79,81	9,14

Sumber: Hasil penelitian, data diolah.

Tabel 4
Nilai Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Tahun 2007-2011 (dalam %)

Jawa Tengah					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	35	82,77	190,92	121,12	18,58
2008	35	96,52	157,30	121,74	13,62
2009	35	89,84	164,38	116,49	17,00
2010	35	76,90	252,27	110,95	28,31
2011	35	90,80	135,35	112,73	10,47
DIY					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	5	105,11	133,79	117,97	10,50
2008	5	111,01	156,11	131,70	18,71
2009	5	93,85	134,40	120,43	16,49
2010	5	90,47	110,87	103,48	8,27
2011	5	108,40	129,72	117,19	8,24

Sumber: Hasil penelitian, data diolah.

Tabel 5 menyajikan gambaran umum mengenai nilai rasio belanja modal terhadap total belanja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat dilihat rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY masing berkisar antara 10,80%-22,38% dan 8,38%-17,08%. Daerah di Jawa Tengah yang paling banyak mengalokasikan belanjanya untuk belanja modal adalah Kabupaten Cilacap tahun 2007, Kota Salatiga tahun 2008-2010, dan Kabupaten Demak tahun 2011. Untuk daerah yang paling sedikit mengalokasikan belanjanya untuk belanja modal adalah Kota Semarang tahun 2007-2008, Kabupaten Klaten tahun 2009-2010, dan Kabupaten Sragen tahun 2011. Untuk DIY, daerah yang paling banyak mengalokasikan belanjanya untuk belanja modal adalah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2007-2009 dan 2011 serta Kabupaten Bantul tahun 2010. Sementara untuk daerah yang paling sedikit mengalokasikan belanjanya untuk belanja modal adalah Kabupaten Sleman tahun 2007-2008 dan 2011, Kabupaten Kulon Progo tahun 2009, dan Kota Yogyakarta tahun 2010.

Gambaran umum mengenai nilai rasio pajak daerah terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai rata-rata rasio pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah berkisar antara 22,31%-26,66%. Kota Semarang tahun 2007-2008 dan 2010-2011, serta Kota Surakarta tahun 2009 merupakan daerah di Jawa Tengah dengan nilai rasio pajak terhadap PAD tertinggi. Sementara Kabupaten Purworejo pada tahun 2007-2009, Kota Magelang tahun 2010, dan Kabupaten Wonosobo tahun 2011 merupakan daerah dengan nilai rasio pajak daerah terhadap PAD terendah di Jawa Tengah. Untuk Provinsi DIY nilai rata-rata rasio pajak daerah terhadap PAD berkisar antara 25,97%-33,72%. Kota Yogyakarta tahun 2007-2008 dan Kabupaten Sleman tahun 2009-2011 merupakan daerah dengan nilai rasio pajak terhadap PAD tertinggi di DIY. Sementara itu secara konsisten dari tahun 2007-2011 Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan nilai rasio pajak daerah terhadap PAD terendah di DIY.

Hasil pengujian outer model dengan indikator reflektif disajikan pada Tabel 7. Dari tabel di atas diketahui variabel PDRB yang diukur dengan LN PDRB dan variabel PAD yang diukur dengan LN PAD telah memenuhi pengujian validitas dan reliabilitas.

Tabel 5
Nilai Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Tahun 2007-2011 (dalam %)

Jawa Tengah					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	35	14,28	31,82	22,38	4,09
2008	35	11,70	34,33	19,62	4,37
2009	35	6,98	34,78	15,40	6,39
2010	35	3,85	21,41	10,80	4,03
2011	35	6,88	22,31	13,13	3,90
DIY					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	5	14,57	20,42	17,08	2,50
2008	5	4,95	19,21	13,13	5,45
2009	5	7,06	14,39	11,17	2,64
2010	5	6,43	12,20	8,38	2,40
2011	5	7,52	15,40	10,89	3,51

Sumber: Hasil penelitian, data diolah.

Tabel 6
Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Tahun 2007-2011 (dalam %)

Jawa Tengah					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	35	14,09	53,95	22,91	10,15
2008	35	12,51	53,55	22,66	10,11
2009	35	11,21	51,15	22,31	10,26
2010	35	11,28	54,17	22,54	10,03
2011	35	13,09	69,04	26,66	12,86
DIY					
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
2007	5	8,71	47,95	26,75	17,01
2008	5	8,77	47,16	25,97	16,59
2009	5	9,02	45,18	26,50	17,07
2010	5	8,93	49,44	27,25	18,17
2011	5	10,89	62,95	33,72	23,07

Sumber: Hasil penelitian, data diolah.

Tabel 7
Hasil Pengujian Outer Model dengan Indikator Reflektif

Uji	Variabel	Item	Kriteria	Nilai	Hasil
Validitas	PDRB	<i>Convergent Validity</i>	>0,7	1,0000	Valid
		<i>Discriminant Validity</i>	>terhadap variabel lain	1,0000	Valid
	PAD	AVE	>0,5	1,0000	Valid
		<i>Convergent Validity</i>	>0,7	1,0000	Valid
Reliabilitas	PDRB	<i>Discriminant Validity</i>	>terhadap variabel lain	1,0000	Valid
		AVE	>0,5	1,0000	Valid
		<i>Composite Reliability</i>	>0,7	1,0000	Reliabel
	PAD	<i>Cronbach Alpha</i>	>0,7	1,0000	Reliabel
		<i>Composite Reliability</i>	>0,7	1,0000	Reliabel
		<i>Cronbach Alpha</i>	>0,7	1,0000	Reliabel

Sumber: *Output SmartPLS.*

Hasil pengujian outer model dengan indikator formatif disajikan pada Tabel 8. Berdasarkan nilai t statistik indikator RKK, RKD, REP, RBM, RPD yang lebih besar daripada t tabel dengan signifikansi 5% yaitu 1,96. Jadi, dapat disimpulkan indikator RKK, RKD, REP, RBM, dan RPD valid untuk mengukur KKD.

Tabel 8
Hasil Pengujian Outer Model dengan Indikator Formatif

Indikator	T Statistik	Hasil
RKK	5,4132	Valid
RKD	2,7027	Valid
REP	2,8361	Valid
RBM	5,1347	Valid
RPD	4,4611	Valid

Sumber: *Output SmartPLS.*

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output *Path Coefficients (Mean, STDEV, dan T-Values)* yang tersaji dalam Tabel 9.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 9, dapat dijelaskan sebagai berikut 1) hasil pengujian hipotesis pengaruh PDRB terhadap PAD menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,6823 dengan nilai T-Statistic 14,8275. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 1,96 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan PDRB terhadap PAD; 2) hasil pengujian hipotesis pengaruh PAD terhadap KKD menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,8341 dengan nilai t statistik 12,6175. Nilai t statistik

Tabel 9
Path Coefficients (Mean, STDEV, dan T-Values)

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistics (O/STERR)</i>
PAD -> KKD	0,8341	0,8322	0,0661	0,0661	12,6175
PDRB -> PAD	0,6823	0,6781	0,0460	0,0460	14,8275

Sumber: *Output SmartPLS.*

tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 1,96 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan PAD terhadap KKD.; 3) pengujian terhadap pengaruh PDRB terhadap KKD dilakukan dengan uji Sobel. Besarnya koefisien tidak langsung PDRB terhadap KKD melalui PAD adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} ab &= a \times b \\ &= 0,6823 \times 0,8341 \\ &= 0,5691 \end{aligned}$$

Besarnya *standar error* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2} \\ &= \sqrt{(0,8341)^2(0,0460)^2 + (0,6823)^2(0,0661)^2 + (0,0460)^2(0,0661)^2} \\ &= 0,0593 \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh nilai t sebagai berikut:

$$\frac{ab}{Sab} = \frac{0,5691}{0,593} = 9,5986$$

Berdasarkan hasil uji sobel diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,5691 dengan t hitung sebesar 9,5986. Nilai t hitung tersebut > t tabel 1,96 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan PDRB terhadap KKD melalui PAD.

Tabel 10
Nilai R-Square dan Koefisien Determinasi

Pengaruh Variabel	R-Square	Koefisien Determinasi
PAD terhadap KKD	0,6958	69,58%
PDRB terhadap PAD	0,4655	46,55%

Sumber: Output SmartPLS.

Tabel 10 menyajikan nilai R-square dan koefisien determinasi untuk variabel *endogenous*. Nilai koefisien determinasi persamaan struktural 1 sebesar 46,55%, berarti 46,55% variasi dalam variabel *endogenous intervening* yaitu PAD dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel *exogenous* yaitu PDRB. Sedangkan sisanya 53,45% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai koefisien determinasi persamaan struktural 2 sebesar 69,58%, berarti 69,58% variasi dalam

variabel *endogenous* dependen yaitu KKD dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel *endogenous intervening* yaitu PAD. Sedangkan sisanya 30,42% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai koefisien parameter jalur untuk pengaruh PDRB terhadap PAD adalah sebesar 0,6823 dengan nilai t statistik lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu 14,8275 sehingga disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, H1 diterima. Meningkatnya PDRB mencerminkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya bertambah. Pajak dan pungutan lainnya merupakan sumber PAD. Dengan kata lain, semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi PAD suatu daerah. Hasil ini mendukung temuan Bappenas (2003) yaitu elastisitas PAD terhadap PDRB pada 12 pemerintah provinsi di Indonesia mempunyai nilai elastisitas lebih dari satu. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kenaikan PAD. Datu (2012) yang meneliti pengaruh PDRB terhadap PAD Kota Makassar dari tahun 1999-2009 juga menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Demikian juga dengan penelitian Adi (2006) pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali tahun 1998-2003 yang juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Nilai koefisien parameter jalur untuk pengaruh PAD terhadap KKD adalah sebesar 0,8341 dengan nilai t statistik lebih besar dari t tabel (1,96) yaitu 12,6175 sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap KKD. Dengan demikian, H2 diterima. Hasil ini mendukung pendapat Chalid (2005) bahwa Kualitas kinerja lembaga dalam pemerintahan berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada. Semakin besar PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah akan meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan daerah, dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai belanjanya. Florida (2006) yang meneliti pengaruh PAD terhadap KKD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2002-2006 juga menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan

terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian pengaruh PAD terhadap KKD dalam penelitian Nugroho dan Abdul (2012) yang dilakukan pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2008-2010 juga menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian Julitawati dkk. (2012) juga menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian tersebut dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2011.

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memungkinkan analisis pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh PDRB terhadap KKD melalui PAD. Berdasarkan hasil uji Sobel diketahui nilai koefisien parameter jalur untuk pengaruh PDRB terhadap KKD melalui PAD sebesar 0,5691 dengan t hitung $>$ dari t tabel (1,96) yaitu sebesar 9,5986 sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap KKD melalui PAD sebagai variabel intervening. Dengan demikian $H3$ diterima.

Hasil ini menunjukkan meningkatnya PDRB yang menggambarkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD. Karena dengan meningkatnya produktivitas masyarakat maka kemampuan masyarakat membayar pajak dan pungutan lain sebagai sumber PAD juga meningkat. Dengan meningkatnya PAD maka akan meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat maupun provinsi, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri belanja daerahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa 1) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD; 2) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap KKD; 3) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap KKD melalui PAD sebagai variabel intervening.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu 1) penelitian ini tidak dapat mendapatkan data tentang biaya

pengumpulan PAD sehingga tidak dapat dihitung rasio efisiensi PAD dan 2) data PDRB dan laporan realisasi anggaran tahun 2012 belum dipublikasikan sehingga tahun yang dianalisis hanya mulai tahun 2007-2011. Keberadaan biaya pengumpulan PAD dan dimensi waktu realisasi anggaran yang lebih luas diharapkan memperbaiki kajian sejenis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006, "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- BPS DIY, 2012, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY 2007-2011*.
- Bappenas, 2003, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan. Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta.
- Datu, Indra Rindu, 2012, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009". *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Florida, Asha, 2006, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara". *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.

Ghozali, Imam, 2011, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit-Undip, Semarang.

Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.

Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin, 2012, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh", *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 (1):1-15.

Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahsun, Mohamad, 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPF, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajat, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.

Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman, 2012, "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1(2):1-14.

Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugianto, 2007, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Grasindo, Jakarta..

Wiyono, Gendro, 2011, *3 in One Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.